



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-70.KP.03.04 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN DAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-KP.06.02-004 tanggal 28 Mei 2021 hal Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1418);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN DAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-70.KP.03.04 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 September 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	I NYOMAN NARIANA, S.H., M.H. NIP. 197409152003121001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	300,000
2.	BIMO MARDI WIBOWO, A.Md.Im., S.H. NIP. 198202012000121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	300,000
3.	DURIATI, S.Kom. NIP. 197910192005012001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta	300,000
4.	KUSWINARNO, S.H., M.H. NIP. 197003221991031002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Baru	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Baru	300,000
5.	RADIAN HILMAN, S.H. NIP. 197706132003121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	150,000
					6 . . .

1	2	3	4	5	6
6.	JULIANA PULUNGAN, S.H. NIP. 198007042005012002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	150,000
7.	GANDA PANTOKO, S.H. NIP. 198004282006041001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	150,000
8.	ADJI SRI BAYU, S.H. NIP. 196902212001121001	Penata Tk. I (III/d)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	150,000
9.	ACHMAD RIZAL MUSAMMAY, S.E. NIP. 197603182002121002	Penata Tk. I (III/d)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta	150,000
10.	M. ANGGA KURNIAWAN, S.Kom., M.M. NIP. 198612162006041001	Penata Muda (III/c)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi	150,000
11.	DANANG ARYA WIDYATMAKA, A.Md.Im., S.H. NIP. 198704242006041001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar	150,000
12.	FAJRI MUTHOHARI, S.H. NIP. 198911262009121002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	150,000
13.	MUSLIM HENDRA KUSUMA, S.Hum. NIP. 198812102014021001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	150,000

1	2	3	4	5	6
14.	APRIANSYAH ABDULLAH N, A.Md.Im., S.Tr.Im. NIP. 199404302016081001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur	100,000
15.	DAVID IKA MARADIKHA NIP. 198408132008011003	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	Pemeriksa Keimigrasian Terampil pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	80,000



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002